



BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPAEN KETAPANG

## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



# 2022

[www.bapenda.ketapangkab.go.id](http://www.bapenda.ketapangkab.go.id)

**FORMAT PENGISIAN BAB III LKPI**

**URUSAN : PEMERINTAHAN ( MANAJEMEN KEUANGAN )**

**A. RINGKASAN DAERAH PELAKSANA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

Ringkasan Kinerja dan capaian indikator kinerja Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TABEL RINGKASAN KINERJA KEGIATAN UTAMA**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.02.	KEUANGAN							
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
5.02.01.201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
5.02.01.201.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1        Dok	1        Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.201.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1        Dok	1        Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.201.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1        Dok	1        Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	

5.02.01.201.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1Dok	1Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.201.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1Dok	1Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.201.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Lap	1Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.201.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1Lap	1Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
5.02.01.202.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110OB	110OB	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.202.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1Dok	1Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.202.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1Dok	1Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.202.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Lap	1Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.202.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Lap	1Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.203		Administrasi Barang Milik						

		Daerah pada Perangkat Daerah						
5.02.01.203.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Lap	8 Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5.02.01.205.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.205.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.205.11			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Org	2 Org	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
5.02.01.206.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.206.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.206.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.206.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	1 Dok	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	

5.02.01.206.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64Lap	64Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
5.02.01.207.01			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pendapatan Daerah)	3Unit	3Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.207.02			Pengadaan Mebel	16Unit	16Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.207.05			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	1Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.207.09			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6Unit	6Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.207.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8Unit	8Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.02.01.208.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1Lap	1Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.208.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3Lap	3Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	

5.02.01.208.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4Lap	4Lap	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5.02.01.209.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55Unit	55Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.209.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44Unit	44Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.209.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Unit	1Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.209.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55Unit	55Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.01.209.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38Unit	38Unit	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.	Tidak ada.	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							

5.02.04.201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
5.02.04.201.01			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1        Dok	1        Dok	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2        Dok	2        Dok	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7        Lap	7        Lap	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3        Unit	3        Unit	Tidak ada	Tidak ada	-
5.02.04.201.05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1        Lap	1        Lap	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11       Lap	11       Lap	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2500    OP	2500    OP	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	1        Dok	1        Dok	Tidak ada	Tidak ada	-
5.02.04.201.09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1        Layanan	1        Layanan	Tidak ada	Tidak ada	-
5.02.04.201.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5        Dok	5        Dok	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.11			Penagihan Pajak Daerah	1        Dok	1        Dok	Tidak ada	Tidak ada	-

5.02.04.201.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dok	1	Dok	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Dok	2	Dok	Terlampir	Terlampir	-
5.02.04.201.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Lap	1	Lap	Terlampir	Terlampir	-

**Ketapang, Januari 2023**  
**Kepala Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Ketapang**



**Drs. P. Devie Frantito, M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19700411 199003 1 004**



TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	9,38%	11,51%	%

TABEL CAPAIAN KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Satuan
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	206.354.014.491,00	230.065.826.467,22	9,38%
	Jumlah APBD	2.198.800.548.855,00	1.999.032.273.564,05	11,51%

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


No	Program	Target	Realisasi	Satuan
1	Rasio PAD	9,38%	11,51%	%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9,38%	11,51%	%

TABEL CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

No	Program	Indikator Program Prioritas	Target	Realisasi	Satuan
1	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan PAD	3.487.039.000,00	2.975.400.688,00	85,33%

Ketapang, Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
Drs. P. Devie Frantito, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004

## B. URAIAN PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

### 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

#### 5.02. KEUANGAN

##### 5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

##### 5.02.04.1.01. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan DPA Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2022 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dan berlokasi di Kabupaten Ketapang dengan indikator kinerja program adalah Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Kinerja 100%. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Adapun pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 2.685.000.000,00 setelah perubahan sebesar Rp. 3.487.039.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 2.975.400.688,00 atau 85,33%.

##### 5.02.04.1.01.01 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah berupa perencanaan teknik pemungutan dan penagihan pajak daerah dengan membuat formulasi yang sinergi dengan peraturan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati atau surat surat lainnya. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penanganan pengelolaan pajak daerah dan penyelesaian masalah-masalah hukum terkait sanksi dari kelalaian dalam membayar pajak dan sebagainya. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan target kinerja 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Jelai Hulu
3. Kec. Kendawangan
4. Kec. Manis Mata
5. Kec. Simpang Hulu
6. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 150.000.000,- dan setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 199.720.000,- atau 99.86%.

##### Permasalahan :

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

##### Solusi :

- Perlu dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatkan wawasan SDM terkait pajak daerah.

#### 5.02.04.1.01.02

#### **Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah berupa tersedianya data PBB-P2 yang dimuktahirkan yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan daerah dari sektor PBB-P2 yang berlokasi di kecamatan dalam kota ketapang, kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah dimana target kinerja 2 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah yang diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Manis Mata

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 49.667.280,- atau 99,33 %

#### **Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajak daerah.

#### **Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Melakukan diklat dan sejenisnya untuk meningkatnya SDM.
- Perlu memperbanyak sosialisasi kepada wajib pajak daerah.

#### 5.02.04.1.01.03

#### **Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah merupakan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak dalam bentuk pertemuan tatap muka, media online, dan media cetak. Kegiatan ini dimaksud kan agar memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak tentang informasi soal Pajak Daerah serta penting Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan target yaitu (7) laporan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi selama 1 tahun yang diselenggarakan melalui media elektronik, media cetak, dan pertemuan secara tatap muka di beberapa Kecamatan yaitu:

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Kendawangan
3. Kec. Manis Mata
4. Kec. Matan Hilir Utara
5. Kec. Nanga Tayap
6. Kec. Sandai
7. Kec. Simpang Hulu

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar

Rp 189.795.950,- atau 94,90%. Dari target sebesar 7 (tujuh) laporan, telah terealisasi output kinerja sebanyak 11 (sebelas) laporan.

**Permasalahan :**

- Permasalahan selama melaksanakan kegiatan adalah terbatasnya sarana prasarana berupa kendaraan operasional double gardan untuk mengunjungi Kecamatan/Desa yang kualitas jalannya rusak berat.

**Solusi :**

- Melaksanakan penganggaran belanja service móbil dan pengadaan móbil operasional baru.

**5.02.04.1.01.04**

**Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah merupakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa barang milik daerah yang dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah. Kegiatan ini berupa pengadaan aplikasi atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah jumlah sarana dan prasarana pengeolaan Pajak Daerah dengan target yaitu 3 unit sarana prasarana. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pembangunan atau pengembangan aplikasi Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bebarapa Aplikasi diantaranya :

1. Aplikasi SIMPADA
2. Aplikasi SISMIOP
3. Aplikasi SIM-PBB

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 180.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 158.354.585,- atau 97,97%.

**Permasalahan :**

- Biaya untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi memerlukan biaya yang sangat besar.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

**Solusi :**

- Untuk tahun yang akan datang penganggaran lebih cermat dan teliti serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Aplikasi.
- Penambahan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

**5.02.04.1.01.05**

**Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Berupa Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), yang bertujuan untuk tersedianya dokumen Pendaftaran dan Pendataan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah (P2D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan target 1 laporan dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah dan beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Delta Pawan
2. Kec. Kendawangan

3. Kec. Manis Mata
4. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum dan sesudah perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 249.585.478,- atau 99,83%.

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum mendaftarkan objek pajak
- Rendahnya kesadaran Wajib Pajak akan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif

**5.02.04.1.01.06**

**Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah berupa kegiatan Pengolahan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi sebanyak 11 jenis pajak, yang bertujuan untuk tersedianya publikasi, dokumen dan realisasi penerimaan serta pemberian reward kepada seluruh desa yang berhasil mencapai target PBB-P2 tahun sebelumnya berupa piagam dan plakat penghargaan PBB-2 sekaligus sosialisasi potensi pajak daerah diwilayah masing-masing desa dan kecamatan dalam rangka pemutakhiran basis data. (Bidang Pelaporan dan Evaluasi). kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dimana Target Kinerja sebanyak 1 Laporan dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan dan perubahan masih sebesar Rp. 315.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 314.346.600,- atau 99,79%.

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Masih ditemukan dilapangan Wajib Pajak yang belum terdaftar objek pajak
- Belum optimalnya perangkat desa di kecamatan dalam rangka tugas pembantuan penerimaan pajak daerah.

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Adanya penyuluhan maupun sosialisasi ke lapangan secara intensif
- Keikutsertaan perangkat desa di Kecamatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

**5.02.04.1.01.07**

**Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa kegiatan penilaian, perhitungan dan penetapan PBB P2 serta objek pajak yang disesuaikan dengan NJOP, sehingga tersedianya data perhitungan dan penetapan pajak PBB P2 serta penyesuaian data NJOP wajib pajak yang berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB)

Indikator kinerja adalah jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya dengan target 2500 Objek Pajak yang dilaksanakan penilaian dengan keluaran sub kegiatan terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan dalam kota ketapang.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 200.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 830.100.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 392.705.800,- atau 47,31%.

**Pemasalahan :**

- Secara keseluruhan permasalahan dalam sub kegiatan penilaian pajak yaitu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus pada anggaran perubahan yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu.

**Solusi :**

- Untuk kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus tidak dilaksanakan pada anggaran perubahan melainkan pada anggaran murni.

**5.02.04.1.01.08**

**Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

Penetapan Wajib Pajak Daerah Berupa kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, yang bertujuan untuk tersedianya data penilaian, perhitungan dan penetapan pajak asli daerah baik wajib pajak yang berada diluar daerah maupun di kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja adalah jumlah dokumen ketetapan pajak daerah dengan target 1 dokumen dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah dan 20 kecamatan di kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi dana APBD sebelum perubahan Rp. 250.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 233.695.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 226.389.231,- atau 96,87%.

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

**5.02.04.1.01.09**

**Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Berupa kegiatan pelayanan dan konsultasi wajib pajak kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah dengan target 1 layanan yang terdiri dari 6.042 berkas PBB dan 4.064 berkas BPHTB serta pembebanan honorarium non pns. Keluaran sub kegiatan ini adalah tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Jelai Hulu
2. Kec. Kendawangan

3. Kec. Sungai Laur
4. Kec. Sungai Melayu
5. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebesar Rp. 250.000.000,- sesudah perubahan Rp 235.568.000,- dengan realisasi Rp. 227.804.000,- atau 96,70%

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali.

**5.02.04.1.01.10**

**Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**

Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah Berupa Tim pelaksana penelitian dan verifikasi realisasi data pajak daerah dari beberapa OPD pengelola pendapatan denda yang dituangkan dalam bentuk rekonsiliasi pendapatan daerah yang bertujuan untuk terlaksananya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Indikator kinerja Jumlah pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi dengan Target Kinerja 5 Dokumen. Sasaran kegiatan adalah terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini didukung dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 120.000.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 185.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 184.054.000,- atau 99,49%.

**Permasalahan :**

- Penganggaran penerimaan dari OPD pengelola pendapatan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi

**Solusi :**

- Tidak ada

**5.02.04.1.01.11**

**Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**

Penagihan Pajak Daerah berupa Kegiatan Penagihan Tunggakan-tunggakan yang Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak serta kegiatan pendistribusian, pengolahan data dan keberatan PBB P2. Penagihan dilakukan dengan cara menyampaikan surat himbauan , melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat desa dean kecamatan, dan penagihan aktif terhadap wajib pajak dengan menyampaikan surat tagihan pajak daerah. Tahun 2022 diterbitkan dan disampaikan surat tagihan pajak daerah sebanyak 1.751 OP di 20 kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB (PBB-P2 dan BPHTB).

Indikator kinerja Jumlah dokumen hasil penagihan pajak daerah dengan target 1 dokumen dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 270.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.957.500,- atau 99,98%

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan

- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

**5.02.04.2.01.12**

**Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Penyelesaian Pajak Daerah berupa Kegiatan bertujuan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah guna tercapainya Target PAD berlokasi di 20 Kecamatan . kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan pengembangan potensi pendapatan daerah (P3D).

Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen keberatan Pajak Daerah dengan target 1 dokumen. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyelesaian keberatan pajak daerah dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 Bulan / 1 Tahun.

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan maupun setelah sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 144.925.864,00 atau 96,62%.

**Permasalahan :**

- Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pengurangan keberatan pajak daerah

**Solusi :**

- Agar sosialisasi maupun penyuluhan tentang penyelesaian keberatan terhadap objek pajak lebih intensif
- 

**5.02.04.2.01.13**

**Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah merupakan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah dan pembebasan Pajak Daerah, penghapusan NPWPD, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, dan penentuan batas minimal omzet. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.

Indikator kinerja adalah jumlah dokumen hasil pemeriksaan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan Pajak Daerah dengan target yaitu 2 (dua) dokumen. Kegiatan ini mendapatkan dukungan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 98.187.000 atau 98,19 %. Dari target 2 (dua) dokumen yang telah ditetapkan, telah terealisasi output kinerja sebanyak 35 dokumen laporan hasil pemeriksaan.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah, permasalahan yang muncul adalah sebagian Wajib Pajak tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan pemeriksaan Pajak oleh tim BAPENDA. Oleh karena itu solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan Negeri Ketapang dalam proses pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah.

**Permasalahan :**

- Tidak ada

**Solusi :**

- Tidak ada



**Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Berupa Data Potensi Pajak Daerah dan Dokumen Produk Hukum di bidang Pajak dan retribusi Daerah yang bertujuan untuk terlaksananya Pengembangan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Guna Meningkatkan PAD berlokasi di Kecamatan. kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengendalian dan pengembangan potensi pendapatan daerah (P3D).

Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dimana target kinerja 1 laporan. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang jangka waktu pelaksanaannya diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan / 1 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa kecamatan diantaranya :

1. Kec. Air Upas
2. Kec. Delta Pawan
3. Kec. Jelai Hulu
4. Kec. Kendawangan
5. Kec. Manis Mata
6. Kec. Tumbang Titi

Kegiatan ini mendapat alokasi dukungan dana APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- setelah perubahan bertambah sebesar Rp 37.676.000,- menjadi sebesar Rp. 287.676.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 269.907.400,- atau 93,82 %

**Permasalahan :**

- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk kelapangan
- Alokasi perjalanan dinas lebih realistis dan sesuai dengan keadaan

**Solusi :**

- Dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kelapangan.
- Penganggaran perjalanan dinas ke kecamatan dapat ditinjau kembali

Ketapang, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang



Drs. P. Devie Frantito, M.M  
Penibina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004

**DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG EVALUASI  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022**

**OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**URUSAN : PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)**

**Daftar rincian nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Tahun 2022**

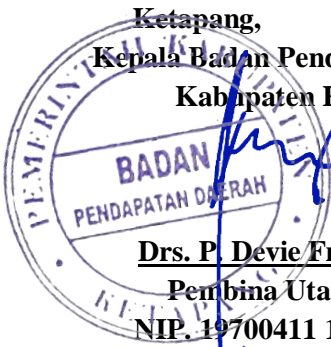
Tahun	Target	Realisasi	%
2021	259.747.473.942,80	280.106.116.424,33	107,84%
2022	206.354.014.491,00	230.065.826.467,22	111,49%

**Daftar rincian Total PAD dalam APBD Tahun 2022**

Tahun	Total Anggaran PAD Sebelum Perubahan	Total Anggaran PAD Setelah Perubahan
2021	196.835.394.881,27	259.747.473.942,80
2022	185.326.784.358,00	206.354.014.491,00

**Daftar rincian jumlah PAD Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>206.354.014.491,00</b>	<b>230.065.826.467,22</b>	<b>111,49%</b>
Hasil Pajak Daerah	119.586.467.997,00	115.321.576.900,38	96,43%
Hasil Retribusi Daerah	7.373.943.046,00	4.293.477.245,00	58,22%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.898.056.245,00	6.607.548.912,00	95,79%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.495.547.203,00	103.843.223.409,84	143,24%

Ketapang, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang  
  
**Drs. P. Devie Frantito, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004

**LAMPIRAN III. 3 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN**  
**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022**

NO	DEFINISI	RUMUS/PERSAMAAN	Data Perhitungan/Capaian Kinerja			
			2021		Tahun 2022	
1	2	3	4		5	
URUSAN WAJIB						
1	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\left( \left( \frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right) \times 100\%$	280.106.116.424,33	7,84%	230.065.826.467,22	111,49%
			$\frac{280.106.116.424,33}{259.747.473.942,80} - 1 \times 100\%$		$\frac{230.065.826.467,22}{206.354.014.491,00} - 1 \times 100\%$	
2	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\frac{\text{Nilai Absolut dari PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \times 100\%$	$\frac{280.106.116.424,33}{259.747.473.942,80} \times 100\%$	107,84%	$\frac{230.065.826.467,22}{206.354.014.491,00} \times 100\%$	111,49%

Ketapang, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
Drs. P. Devie Frantito, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004